

PENERAPAN SISTEM APLIKASI PELAYANAN KEPEGAWAIAN (SAPK) (STUDI PADA APLIKASI KENAIKAN PANGKAT PNS DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR)

Poppy Ayu Permatasari

12040674010 (Prodi S1 Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) poppyap22@gmail.com

Dra. Meirinawati, M.AP.

0021056804 (Ilmu Administrasi Negara, FISH, UNESA) meirinawati91@yahoo.co.id

Abstrak

Electronic Government sudah banyak diterapkan diberbagai instansi baik instansi pemerintahan/Negeri maupun instansi swasta, salah satu instansi pemerintah/Negeri yang menerapkan *Electronic Government* adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Sebagai instansi pemerintahan/Negeri yang menaungi para Pegawai Negeri Sipil dalam pelayanan yang berbasis elektronik yaitu Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) khususnya pada aplikasi kenaikan pangkat PNS di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Adapun fokus dari penelitian ini adalah delapan elemen sukses keberhasilan *e-government* menurut Indrajit, yaitu *political environment*, *leadership*, *planning*, *stakeholders*, *transparency*, *budgets*, *technology*, *innovation*. Subyek penelitian dalam penelitian ini diambil dengan teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SAPK di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik, meskipun terdapat beberapa kendala. Hal tersebut diketahui melalui implementasi elemen *political environment* yang bertipe *Top Down Projects* (TDP). Elemen *leadership* yang mana peran kepala kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur dalam penerapan SAPK sudah baik. Elemen *planning* dalam penerapan SAPK di kantor ini tidak mengetahui perencanaan dari adanya SAPK, kantor ini hanya sebagai pelaksana saja. Elemen *stakeholders* yang memiliki komitmen untuk menjalin komunikasi dan kerja sama yang baik antara pegawai satu dengan pegawai yang lainnya. Elemen *transparency* yang dapat membuka dan mengakses SAPK di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ialah hanya para pegawai di bidang mutasi khususnya di sub bidang pangkat, pindah, dan pensiun. Elemen *budgets* dalam penerapan SAPK di kantor ini tidak ada anggaran untuk SAPK sendiri. Elemen *technology* sudah baik dan dikatakan sudah cukup canggih. Elemen *innovation* dapat dilihat dari kegiatan para pegawai yang melakukan lembur dan membuat aplikasi program kenaikan pangkat.

Kata Kunci: *Electronic Government*, SAPK, Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS

Abstract

Electronic Government has been widely applied in various agencies both government (agencies/state) and private institutions, one of the government (agencies/state) implementing Electronic Government is Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. As government (agencies/state) that shaded the Civil Servants in electronic-based services that is Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK). The purpose of this study to describe the implementation of Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) particularly on the promotion application of public servant at Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur. The type of research that used in this research is descriptive with qualitative approach. The focus of this research is the eight elements of successful e-government by Indrajit, the political environment, leadership, planning, stakeholders, transparency, budgets, technology, innovation. Research subjects in this study were taken by purposive sampling technique. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Data were analyzed using data analysis techniques interactive model. The results showed that the implementation SAPK at Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur it can be said has been running well, although there are some obstacles. It is known through the implementation of elements of the political environment of the type Top Down Projects (TDP). Elements of leadership in which the role of head office Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur in the implmntation of SAPK own good. Planning element in the implementation SAPK in this office does not know the plans of the SAPK, this office only as implementers. Elements of stakeholders who are committed to establish communication and good cooperation between employees of one with the other employees. Elements of transparency that can open and access SAPK di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur is the only employees in the field of mutation, especially in sub-fields of rank, moved, and retired. Budgets element in the application at this office no budget for SAPK own. Element technology is sound and is said to be already quite advanced. Elements of innovation can be seen from the activities of the employees who do overtime and make the application program promotion.

Keyword: *Electronic Government*, SAPK, Promotion Application Of Public Servant

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat mendorong pemanfaatannya dalam berbagai bidang. Teknologi informasi memiliki peranan penting dalam mewujudkan perubahan cara kerja yang memudahkan manusia untuk menyelesaikan pekerjaannya.

“Information Technology Association of America (ITAA) yang dikutip oleh Sutarman (2009:13) menjelaskan bahwa, teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen system informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer”.

Penggunaan teknologi informasi pada saat ini menjadi sebuah tuntutan dan kebutuhan setiap aktivitas. Salah satu wujud dari penggunaan teknologi informasi yang sering digunakan adalah perangkat komputer dan internet. Komputer mampu mengelola dan memproses pengolahan data secara cepat dan efisien yang sangat berguna bagi kehidupan manusia. Internet juga mampu menghubungkan berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda dengan sistem operasi maupun aplikasinya dimana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media teknologi.

Kemajuan di bidang teknologi yang canggih tentunya tidak luput dari Sumber Daya Manusia (SDM), karena yang menciptakan dan mengoperasikan sebuah komputer dan internet tersebut ialah manusia. Oleh karena itu diperlukan SDM yang mempunyai kompetensi yang tinggi karena keahlian atau kompetensi akan mendukung terciptanya suatu peningkatan teknologi yang lebih baik lagi. Peningkatan teknologi seperti komputer semakin berkembang pesat dan telah menciptakan perangkat-perangkat baru serta meningkatkan kualitas perangkat tersebut yang nantinya akan memudahkan dan memperlancar pekerjaan manusia baik yang bekerja di instansi publik maupun swasta. Adapun salah satu bentuk nyata pemanfaatan teknologi informasi dalam instansi publik yaitu diwujudkannya dalam konsep *Electronic Government*.

Electronic Government atau *e-gov* yang disebut pula sebagai pemerintahan digital merupakan penggunaan teknologi informasi yang dibuat oleh institusi atau lembaga pemerintahan (*United Nation Development Program* dalam Indrajit, 2006:2). *E-gov* merupakan sebuah cara untuk membantu proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan *e-gov* sendiri untuk memperbaiki pelayanan pemerintah kepada *stakeholder*-nya (masyarakat, kalangan bisnis, dan industri) dan dapat menjadikan pelaksanaan pemerintahan lebih efisien. Salah satu pekerjaan yang dilakukan dengan

menggunakan *e-gov* adalah Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

“SAPK merupakan sistem pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dan terhubung secara on-line dengan seluruh instansi untuk memberikan pelayanan kepegawaian. SAPK ini digunakan dalam berbagai proses layanan kepegawaian seperti penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan updating data mutasi” (<http://bkd.pemkomedan.go.id>). “Di dalam ruang lingkup SAPK meliputi: aplikasi pengadaan PNS, aplikasi kenaikan pangkat PNS, aplikasi pensiun PNS, dan aplikasi mutasi lain-lain”. (<http://jatim.kemenag.go.id>).

Dari beberapa macam aplikasi yang disediakan dalam SAPK, salah satu aplikasi yang sering digunakan adalah aplikasi kenaikan pangkat PNS.

“Kenaikan pangkat mempunyai pengertian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan terhadap Negara. Selain itu, kenaikan pangkat juga dimaksudkan sebagai dorongan kepada Pegawai Negeri Sipil untuk lebih meningkatkan prestasi kerja dan pengabdiannya” (www.sdm.depkeu.go.id).

Salah satu instansi yang menerapkan SAPK yaitu Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur. BKD Provinsi Jawa Timur merupakan instansi yang diberi kewenangan dan instansi yang ditunjuk pertama kali oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) sebagai kantor yang menerapkan SAPK sebelum diterapkan di semua kantor BKD lainnya. Didalam penerapan SAPK ini, BKD Provinsi Jawa Timur diberi kewenangan dan diberi fasilitas akses oleh BKN. BKD Provinsi Jawa Timur melakukan penerapan SAPK ini pada tahun 2012 namun belum menggunakan website, dan pada tahun 2013 BKD Provinsi Jawa Timur menerapkan SAPK dengan menggunakan website.

SAPK sendiri memiliki kelebihan dalam penerapannya yakni karena sistemnya yang online, maka dapat dibuka dimana saja, dapat melihat data PNS apabila membutuhkan data secara cepat, mempercepat proses kenaikan pangkat PNS, mempermudah dan meringankan pekerjaan PNS yang memiliki wewenang dalam penggunaan SAPK, dan menghindari kesalahan teknis.

Pada saat pelaksanaan SAPK yang khususnya pada kenaikan pangkat PNS dengan menggunakan aplikasi, tentunya ada permasalahan-permasalahan dalam proses pelaksanaannya. Permasalahan yang paling menonjol adalah pada saat login membuka SAPK tersebut lemot dan lama. Selain itu, pada saat mencetak surat keputusan harus dilakukan satu persatu, sehingga membutuhkan waktu yang lama. Hal ini terbukti dengan pernyataan salah satu pegawai yang menangani SAPK dan hasil observasi sementara yang dilakukan oleh peneliti di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur pada saat melakukan pengusulan kenaikan pangkat dengan menggunakan aplikasi kenaikan pangkat PNS yang ada di SAPK adalah saat itu pada sistem yang ada di SAPK mengalami lemot, lama dan apabila mencetak Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat harus dilakukan satu-persatu. Sehingga peneliti tertarik untuk mengambil judul “Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (Studi Pada Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur)”

A. Rumusan Masalah

Selaras dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang sesuai yakni “Bagaimanakah Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Pada Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur?”

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) Pada Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur.

C. Manfaat Penelitian

Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini diharapkan akan mempunyai implikasi teoritis bagi Ilmu Administrasi Negara khususnya tentang *Electronic Government*.

Manfaat Praktis

Bagi Mahasiswa

Menambah pengetahuan, wawasan dan pengalaman dalam hal penelitian serta penerapan konsep atau teori ilmu administrasi negara yang telah diperoleh selama perkuliahan sehingga mampu memberikan bekal dalam penyelesaian berbagai tantangan dalam dunia kerja dimasa mendatang.

Bagi Universitas Negeri Surabaya

Menambahkan kelengkapan daftar rujukan di Universitas Negeri Surabaya bagi penulis lain terkait pembahasan *Electronic Government*.

Bagi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK).

KAJIAN PUSTAKA

A. Pelayanan Publik

Pelayanan publik diartikan oleh Thoha dalam Sedarmayanti (2009:243), pelayanan masyarakat adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dan instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat dalam mencapai tujuan. Sedangkan menurut Henry dalam Sedarmayanti (2009:244), *public service* ditujukan kepada pelayanan terhadap kebutuhan yang bersifat umum dari masyarakat, karena itu dapat dituntut agar dilaksanakan.

Menurut Ratminto dan Atik (2005:5), menjelaskan bahwa pelayanan publik atau pelayanan umum adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk publik maupun barang jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari berbagai pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa pelayanan publik adalah sebuah usaha yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang dan instansi tertentu untuk memberikan segala bentuk pelayanan kepada masyarakat yang berupa jasa pelayanan, baik dalam bentuk publik maupun barang jasa publik.

B. *Electronic Government*

Anwar dan Oetoyo (2004:25), menyatakan bahwa *ee-government* adalah Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintah oleh lembaga pemerintah untuk meningkatkan kinerja dan hubungan antar pemerintah dengan pihak lain. Menurut Bank Dunia dalam Indrajit (2004:2) sebagai:

“*E-Government refers to the use by government agencies of information technologies (such as Wide Area Network, the Internet, and mobile computing) that have ability to transform relation with citizens, businesses, and other arms of government*”. (E-Government mengacu kepada kemampuan penggunaan teknologi informasi oleh institusi pemerintahan untuk mengubah relasi dengan masyarakat, kalangan bisnis dan lembaga pemerintahan lainnya).

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka pengertian *E-Government* mengacu pada dua hal yaitu, pertama adalah penggunaan teknologi informasi (internet) sebagai alat bantu, dan yang kedua adalah tujuan pemanfaatannya, sehingga pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan efisien.

C. Elemen Sukses Manajemen Proyek *Electronic Government*

Sebuah hasil riset di bidang *e-government* yang diadakan oleh University of Maryland bertujuan untuk mencari tahu elemen-elemen yang menjadi kunci keberhasilan dari berbagai proyek *e-government* yang sukses (best practices). Berdasarkan studi tersebut kemudian dirumuskan delapan elemen sukses di dalam melakukan manajemen proyek *e-government* menurut Indrajit (2002:61). Masing-masing elemen tersebut diuraikan antara lain sebagai berikut:

1. *Political Environment* (Lingkungan Politik)

Political environment adalah keadaan atau suasana dimana politik proyek yang bersangkutan berada atau dilaksanakan. Berkaitan dengan *political environment*, terdapat dua tipe proyek yaitu *Top Down Projects* (TDP) dan *Bottom Up Projects* (BUP).

2. *Leadership* (Kepemimpinan)

Faktor kepemimpinan memiliki peran yang sangat penting dalam mempengaruhi kegagalan atau keberhasilan implementasi kebijakan atau program.

3. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan merupakan tahap awal sebelum dilakukan sebuah implementasi kebijakan atau proyek. Perencanaan dilakukan untuk memproyeksikan hasil yang ingin dicapai dan untuk mengetahui sejauh mana pentingnya perencanaan sebelum implementasi proyek.

4. *Stakeholders* (Pihak yang Berkepentingan)

Stakeholders merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau proyek dan untuk lebih memahami siapa yang termasuk *stakeholders* dalam proyek *e-government*.

5. *Transparency* (Keterbukaan)

Penerapan *e-government* tentunya diharapkan dapat mewujudkan adanya keterbukaan dalam setiap prosesnya.

6. *Budgets* (Anggaran)

Besarnya anggaran yang disediakan pemerintah (dan kalangan lain semacam swasta atau bantuan dari luar negeri) sangat bergantung pada tingkat prioritas yang diberikan oleh pemerintah terhadap status proyek terkait.

7. *Technology* (Teknologi)

Spektrum teknologi informasi yang dipergunakan dalam proyek *e-government* sangatlah lebar, dari yang paling sederhana dan murah sampai dengan yang paling canggih. Sumber Daya Manusia (SDM) juga mempengaruhi perkembangan teknologi yang digunakan,

semakin tinggi kualitas SDM maka semakin canggih pula teknologi yang mampu dikembangkan.

8. *Innovation* (Inovasi)

Elemen terakhir yang turut memberikan kontribusi terhadap berhasil tidaknya *electronic government* adalah kemampuan SDM untuk melakukan inovas-inovasi tertentu.

D. Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

SAPK adalah sistem pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dan terhubung secara on-line dengan seluruh instansi untuk memberikan pelayanan kepegawaian (perka BKN no 14 tahun 2011).

“SAPK digunakan dalam berbagai proses layanan kepegawaian seperti penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan updating data mutasi”.

(<http://bkd.pemkomedan.go.id>)

Jadi SAPK ini merupakan suatu sistem pelayanan yang melayani para pegawai yang khususnya pada penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan updating data mutasi yang terintegrasi dan terhubung secara on-line.

METODE

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu (Sugiyono, 2010:40). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber atau informan berjumlah 4 yakni

1. Kepala Bidang Mutasi yaitu Drs. H. Erfan Effendy.
2. Kepala Sub Bidang Pangkat, Pindah, dan Pensiun yaitu Wiwiek Herlina, S.E.
3. Pegawai Sub Bidang Pangkat, Pindah, dan Pensiun yaitu Hary Gunawan.
4. Pegawai Sub Bidang Pangkat, Pindah, dan Pensiun yaitu Hendri Syuharyadi, S.H.

Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Purposive Sampling* Menurut Sugiyono (2010:219), menjelaskan bahwa *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang apa

yang kita harapkan atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model interaktif analisa penelitian kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Gambaran Umum Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

1) Lokasi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur adalah perangkat daerah yang melaksanakan manajemen Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam mengemban tugas pokok Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur berlokasi di Jl. Jemur Andayani 1 Surabaya.

2) Visi dan Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur

(a) Visi

Mewujudkan aparatur birokrasi Jawa Timur lebih bersih, profesional dan sejahtera.

Visi ini diperlukan agar mampu mengarahkan penyelenggaraan manajemen pegawai negeri sipil dalam rangka mendukung kebijakan Gubernur Jawa Timur dalam pencapaian tujuan pembangunan daerah 2014-2019.

(B) Misi

Memberikan kontribusi optimal terwujudnya SDM aparatur lebih bersih, professional dan sejahtera melalui penyelenggaraan pelayanan manajemen aparatur berkualitas.

Misi ini telah dirumuskan dalam Rencana Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur 2014-2019.

3) Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK)

(a) Pengertian SAPK

SAPK merupakan sistem pelayanan kepegawaian yang terintegrasi dan terhubung secara on-line dengan seluruh instansi untuk memberikan pelayanan kepegawaian. SAPK ini digunakan dalam berbagai proses layanan kepegawaian seperti penetapan NIP, pencetakan surat keputusan pengangkatan CPNS, pemberian nota persetujuan/pertimbangan teknis kenaikan pangkat, penetapan dan pencetakan surat keputusan pemberhentian dengan hak pensiun dan updating data mutasi.

(b) Kelembagaan, Personil, dan Sarana Prasarana SAPK

(1) Kelembagaan

SAPK dikelola oleh lembaga-lembaga sebagai berikut:

- 1) BKN Pusat
- 2) Kantor Regional BKN; dan
- 3) Biro Kepegawaian/Badan/Bagian Kepegawaian Instansi

(2) Personil

Untuk menangani dan mengelola SAPK perlu didukung oleh tenaga-tenaga/personil, yang memiliki kemampuan sebagai berikut:

- 1) Pranata Komputer;
- 2) Analis Kepegawaian; atau
- 3) Operator Komputer

(3) Sarana dan Prasarana

1) Perangkat Keras (*Hardware*), berupa:

- a) Personal Komputer
- b) *Server*
- c) *Switch*; dan
- d) Printer

2) Perangkat Lunak (*Software*)

Perangkat lunak yang diperlukan harus sesuai dengan aplikasi yang dibangun oleh BKN.

3) Penyiapan Jaringan

Implementasi SAPK memerlukan jaringan komunikasi data antara BKN dengan Kantor Regional BKN, BKN dengan Instansi Pusat, Kantor Regional BKN dengan Instansi Daerah. Instansi pengguna SAPK perlu menyiapkan jaringan dengan *bandwidth* minimal 2X64 kbps, *network switch* dengan spesifikasi standar. Keseluruhan biaya yang diperlukan, dibebankan kepada anggaran masing-masing pengguna aplikasi.

B. Pembahasan

Dari hasil penelitian yang diuraikan diatas, selanjutnya hasil tersebut akan dibahas dengan menggunakan kedelapan elemen sukses manajemen proyek *electronic government* menurut Indrajit (2002:61) yang meliputi:

(1) *Political Environment* (Lingkungan Politik)

Political Environment adalah keadaan atau suasana politik dimana politik proyek yang bersangkutan berada atau dilaksanakan. Dasar hukum yang dijadikan acuan penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur tersebut menunjukkan bahwa pemerintah pusat yakni BKN Pusat memegang otoritas tertinggi penerapan SAPK. Sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur dikategorikan bertipe *Top Down Projects* (TDP).

Tidak ada pihak yang pro dan kontra dalam penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur ini, karena dengan adanya SAPK memudahkan pegawai dalam pekerjaan yang berhubungan dengan Kenaikan Pangkat. Namun, yang menjadi kendala dalam penerapan SAPK ini yakni pada saat mengakses SAPK khususnya

untuk kenaikan pangkat pada bulan Januari sampai akhir Februari untuk periode 1 April dan bulan Juli sampai akhir Agustus untuk periode 1 Oktober tersebut lemot, karena yang mengakses SAPK tersebut seluruh Indonesia.

(2) *Leadership* (Kepemimpinan)

Ruang lingkup kepemimpinan dalam penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur merupakan elemen penting yang dapat mempengaruhi kelangsungan suatu proyek *e-government*. Penerapan SAPK ini diselenggarakan oleh BKN Pusat dan telah dilaksanakan di BKD Provinsi Jawa Timur sejak Oktober 2013. Peran pimpinan yang handal dalam penerapan SAPK dibutuhkan agar dapat memberikan progress dalam implementasi kedepannya.

Peran BKN Pusat dalam penerapan SAPK ini sudah baik, karena pimpinan mampu mempengaruhi instansi bawahannya seperti Kantor Regional, BKD Provinsi Jawa Timur, dan BKD Kota untuk melaksanakan kebijakan SAPK. Peran BKD Provinsi Jawa Timur sendiri juga sudah baik, karena pimpinan mampu mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan penerapan SAPK.

(3) *Planning* (Perencanaan)

SAPK merupakan aplikasi yang memanfaatkan teknologi informasi untuk memfasilitasi para PNS yang nantinya akan naik pangkat di setiap tingkatan-tingkatan sesuai dengan jabatan yang akan naik pangkat ke jabatan selanjutnya. Hal ini membuat penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur dijadikan sebagai proyek dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan pemanfaatan *e-government* yang diberikan wewenang dalam mengakses SAPK dan mengentry data PNS yang akan naik pangkat.

Pihak BKD Provinsi Jawa Timur ini tidak mengetahui *planning* dari adanya SAPK, karena yang mengetahui pihak pemerintah pusat yakni BKN Pusat di Jakarta karena BKN Pusat yang membuat SAPK. Pihak BKD Provinsi Jawa Timur hanya user sebagai pelaksana saja dan BKD Provinsi Jawa Timur mengetahui SAPK sewaktu mengikuti sosialisasi mengenai SAPK. Dengan adanya SAPK bertujuan untuk mempermudah proses Kenaikan Pangkat PNS seluruh Indonesia.

(4) *Stakeholders* (Pihak yang Berkepentingan)

Stakeholders merupakan salah satu elemen yang mempengaruhi implementasi kebijakan atau proyek selain faktor *political environment*, *leadership*, dan *planning*. *Stakeholders* adalah berbagai pihak yang merasa memiliki kepentingan (langsung maupun tidak langsung) terhadap penyelenggara proyek *e-government* terkait.

Stakeholders yang berperan dalam penerapan SAPK ini adalah BKN Pusat, Kantor Regional BKN, BKD Provinsi Jawa Timur, BKD Kota. Peran dari *stakeholders* dalam penerapan SAPK ini adalah sesuai

dengan kewenangan masing-masing instansi yang diberikan BKN Pusat kepada Kantor Regional, BKD Provinsi Jawa Timur, BKD Kota. Peran pihak BKN Pusat sebagai pengontrol sistem yang ada di SAPK dan mengendalikan SAPK. Peran Kantor Regional BKN dengan wilayah masing-masing provinsi sebagai verivikator berkas dan data usul kenaikan pangkat. Peran BKD sebagai pengusulan kenaikan pangkat PNS yang akan naik pangkat.

(5) *Transparency* (Keterbukaan)

Aspek penting dalam implementasi kebijakan salah satunya adalah *Transparency* atau keterbukaan. Transparansi sebuah proyek *e-government* sangat erat kaitannya dengan keberadaan *stakeholders*. Pemerintah dituntut untuk terbuka dan menjamin akses *stakeholders* terhadap berbagai informasi mengenai proses kebijakan.

Wujud *transparency* atau keterbukaan dalam penerapan SAPK ini berbentuk online dan yang dapat membuka dan mengakses SAPK adalah para pegawai bidang mutasi khususnya di sub bidang pangkat, pindah, dan pensiun. Upaya dalam mewujudkan *transparency* atau keterbukaan dalam penerapan SAPK ini sebelum penerapan SAPK berlangsung di seluruh Indonesia, terdapat sosialisasi mengenai SAPK guna untuk menjelaskan bagaimana cara mengakses SAPK.

(6) *Budgets* (Anggaran)

Kekuatan sumber daya financial yang dianggarkan pada sebuah proyek *e-government* merupakan salah satu elemen strategis dan sangat menentukan berhasil tidaknya sebuah proyek. Penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur tidak ada *budgets* atau anggaran dalam penerapan SAPK, karena BKD Provinsi Jawa Timur hanya sebagai user pengguna SAPK saja. Terkait dengan fasilitas pendukung dalam SAPK yang terdiri dari wifi, komputer, dan kertas tersebut sudah ada sebelum adanya SAPK.

(7) *Technology* (Teknologi)

Kemajuan teknologi dan informasi merupakan realita yang harus dihadapi di era modern. Pesatnya perkembangan teknologi informasi akan membawa dampak perubahan pola pikir dan cara pandang setiap manusia dalam melakukan berbagai kegiatan yang menginginkan adanya kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi dan pekerjaan yang cepat diselesaikan. Infrastruktur teknologi informasi seperti jaringan, database, tools, maupun software lainnya telah banyak membawa beberapa keuntungan khususnya dalam hal efisiensi, keefektifan, dan keamanan.

Kualitas teknologi dalam penerapan SAPK ini sudah memadai, namun terdapat kendala yang dihadapi yakni pada saat mengakses SAPK di waktu pengusulan kenaikan pangkat dan pada saat mengakses di jam kerja mengalami lemot. Teknologi yang digunakan dalam

penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur ini yakni sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian yakni bentuk databasenya berupa Minimum Microsoft SQL-Server 2000.

SAPK ini juga terdapat keamanannya. Fitur keamanan yang diterapkan pada SAPK ini adalah pada saat akan mengakses SAPK ini harus mengisi *username* dan *password*. Keamanan lainnya yakni pada saat menggunakan SAPK, namun ditinggal untuk beberapa saat maka akan logout dengan sendirinya dan akan muncul tulisan session telah berakhir.

(8) *Innovation* (Inovasi)

Elemen terakhir yang turut memberikan kontribusi terhadap berhasil tidaknya penerapan SAPK adalah kemampuan SDM untuk melakukan inovasi-inovasi tertentu. Penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur tidak akan berjalan dengan lancar apabila tidak terdapat inovasi-inovasi yang dibuat oleh seluruh pegawai di kantor BKD Provinsi Jawa Timur.

Bentuk inovasi yang dilakukan pegawai BKD Provinsi Jawa Timur melakukan lembur diluar jam kerja dan menciptakan aplikasi yang bernama Program Kenaikan Pangkat. Melakukan lembur diluar jam kerja ini dilakukan apabila pekerjaan yang berhubungan dengan SAPK khususnya kenaikan pangkat pada saat bulan Januari sampai akhir Februari untuk periode 1 April dan bulan Juli sampai akhir Agustus untuk periode 1 Oktober, karena pada saat melakukan pekerjaan di jam kerja terdapat kendala yakni lemot akibat banyaknya pegawai yang mengakses SAPK, karena yang mengakses SAPK tersebut seluruh pegawai Indonesia yang memegang hak akses sebagai pengguna SAPK. Menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Program Kenaikan Pangkat ini guna untuk mengatasi kendala mencetak Surat Keputusan (SK) Kenaikan Pangkat, karena dalam SAPK ini apabila mencetak SK harus satu-satu, sehingga akan memperlambat pekerjaan para pegawai.

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan dalam pembahasan mengenai Penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) (Studi Pada Aplikasi Kenaikan Pangkat PNS DI Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur) yang dilihat dengan menggunakan delapan elemen sukses manajemen proyek *electronic government* menurut Indrajit (2002:61) yang meliputi:

Indikator pertama, yaitu *political environment* dalam penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur

bertipe *Top Down Projects* (TDP), yaitu kebijakan dari pemerintah yakni Badan Kepegawaian Negara (BKN) Pusat.

Indikator kedua, yaitu *leadership* dalam penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur sudah baik, hal tersebut dibuktikan dengan kemampuan pimpinan dari pihak BKN Pusat dengan instansi yang diberi kewenangan dalam menggunakan SAPK saling bekerja sama, saling berkoordinasi, dan juga beserta pegawai di BKD Provinsi Jawa Timur yang saling bekerja sama dan berkomitmen dalam melayani PNS yang akan naik pangkat dalam mensukseskan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur. Pimpinan dari pihak BKD Provinsi Jawa Timur juga sudah baik, karena pimpinan mampu mempengaruhi bawahannya untuk melaksanakan penerapan SAPK.

Indikator ketiga, yaitu *planning* dalam penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur ini pihak BKD Provinsi Jawa Timur tidak mengetahui *planning* atau perencanaan dari adanya SAPK, karena yang mengetahui pihak pemerintah pusat yakni BKN Pusat karena pihak BKD Provinsi Jawa Timur hanya user sebagai pelaksana saja dan BKD Provinsi Jawa Timur mengetahui SAPK sewaktu mengikuti sosialisasi mengenai SAPK.

Indikator keempat, yaitu *stakeholders* yang terlibat dalam penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur yakni para pegawai di BKN Pusat, Kantor Regional BKN, BKD Provinsi Jawa Timur, dan BKD Kota, para pegawai ini saling menjalin komunikasi dan bekerja sama dengan baik agar dapat mensukseskan penerapan SAPK.

Indikator kelima, yaitu *transparency*. Wujud *transparency* dalam penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur ini berbentuk online dan yang dapat membuka dan mengakses SAPK adalah para pegawai bidang mutasi khususnya di sub bidang pangkat, pindah, dan pensiun. Upaya dalam mewujudkan *transparency* atau keterbukaan penerapan SAPK ini sebelum penerapan SAPK berlangsung diseluruh Indonesia, terdapat sosialisasi mengenai SAPK guna untuk menjelaskan bagaimana cara mengakses SAPK.

Indikator keenam, yaitu *budgets* dalam penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur ini tidak ada *budgets* atau anggaran dalam penerapan SAPK, karena BKD Provinsi Jawa Timur hanya sebagai user pengguna SAPK saja. Terkait dengan fasilitas pendukung dalam SAPK yang terdiri dari wifi, komputer, dan kertas tersebut sudah ada sebelum adanya SAPK.

Indikator ketujuh, yaitu *technology* dalam penerapan SAPK di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur ini sudah memadai karena dapat membantu proses dari pekerjaan para pegawai yang sebagai pengguna SAPK, namun terdapat kendala yang dihadapi

yakni pada saat mengakses SAPK di waktu pengusulan kenaikan pangkat dan pada saat mengakses di jam kerja mengalami lemot. Keamanan dari teknologi dalam SAPK ini sudah sangat bagus karena dapat menjaga data-data yang ada dalam SAPK ini.

Indikator kedelapan, yaitu *innovation* dalam penerapan SAPK di BKD Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan bentuk inovasi yang dilakukan oleh para pegawai BKD Provinsi Jawa Timur yakni menciptakan sebuah aplikasi yang bernama Program Kenaikan Pangkat guna untuk mencetak Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dengan jumlah yang banyak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan saran yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan penerapan Sistem Aplikasi Pelayanan Kepegawaian (SAPK) khususnya pada aplikasi kenaikan pangkat PNS di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Timur yaitu:

- (1) Pihak BKN Pusat seharusnya menambah server SAPK, agar pada saat bulan kenaikan pangkat tiba server SAPK tidak overload yang sehingga menyebabkan lemot.
- (2) Pihak BKN Pusat seharusnya memberikan akses untuk mencetak Surat Keputusan Kenaikan Pangkat dengan jumlah yang banyak, agar pada saat mencetak Surat Keputusan Kenaikan Pangkat tersebut tidak satu-persatu.
- (3) Seharusnya PNS yang akan naik pangkat dapat melihat datanya apakah sudah diusulkan atau belum ke pihak BKN, agar PNS tersebut mengetahui dengan sendirinya.

DAFTAR PUSTAKA

Rujukan Buku

- Anwar, M. Khoirul dan Oetojo S, Asianti. 2004. *SIMDA: Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Bagi Pemerintah di Era Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Indrajit, Richardus Eko. 2002. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Indrajit, Richardus Eko. 2004. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi
- Indrajit, Richardus Eko. 2006. *Electronic Government Strategi Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Digital*. Yogyakarta: Andi

- Ratminto dan Atik, Septi Winarsih. 2005. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sedarmayanti. 2009. *Reformasi Administrasi Publik. Reformasi Birokrasi dan Kepemimpinan Masa Depan (Mewujudkan Pelayanan Prima dan Pemerintahan yang Baik)*. Bandung: Refika Aditama
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. ALFABETA
- Sugiyono. 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. ALFABETA
- Sutarman. 2009. *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Sinar Grafika Offset

Rujukan Website

- www.sdm.depkeu.go.id/doc/pp122002.pdf diakses pada tanggal 20 Oktober 2015
- <http://bkd.pemkomedan.go.id/pupns2015/Perka%20BKN%20No%2014%20Tahun%202011%20ttg%20Pedoman%20Pengembangan%20Database%20PNS.pdf> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015
- <http://jatim.kemenag.go.id/file/file/peraturantentangPNS/qnxd1413440491.pdf> diakses pada tanggal 29 Oktober 2015